



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235
PURBALINGGA 53371

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT – Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2026.

Dengan telah tersusunya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik dan dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik pikiran maupun informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, semoga Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga ini dapat terlaksana dan tercapai sesuai target, Amin.

Purbalingga, 9 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga



★ Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Landasan Hukum	1
3.1 Maksud dan Tujuan	3
4.1 Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPSTP	28
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMPTSP (Memuat Program Dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif)	41
BAB V. PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RKPD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

RKPD sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2026 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan prakiraan maju tahun 2026.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan RKPD, Renstra, hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat, Renja DPMPTSP 2026 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Selanjutnya Racangan Akhir Renja DPMPTSP 2026 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 didasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Bebas Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga;
 18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 dimaksudkan:

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif serta sumber pendanaan;
2. Sebagai pedoman bagi pimpinan dan segenap pegawai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga dalam menyusun berbagai kebijakan maupun program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah

1. Pedoman pelaksanaan program, dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel serta konsisten dengan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
3. Sebagai akuntabilitas kinerja instansi publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PADA TAHUN LALU

Bab II ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMPTSP, Analisis Kinerja Pelayanan DPMPTSP, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP, Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMPTSP

Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga merupakan perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. Rencana awal suatu perangkat daerah adalah penjabaran perencanaan tahunan dari rencana strategis (Renstra) OPD yang akan dilaksanakan. Dalam dokumen rancangan tertuang tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program dan kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Pelayanan perizinan usaha, perizinan non usaha dan perizinan penanaman modal secara terpadu yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu bentuk dan wujud nyata dari Upaya pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya, sehingga pelayanan perizinan menjadi ujung tombak dalam menggerakkan perekonomian Masyarakat serta memudahkan investor dalam meningkatkan investasi di Kabupaten Purbalingga. Sehingga terwujud komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara cepat, mudah dan transparan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga telah memperlihatkan pencapaian kinerja pada 3 (tiga) sasaran strategisnya pada tahun 2024 lalu sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya daya Tarik investasi di daeah	Realisasi investasi	Rupiah	1.535.087.000.000	1.001.180.131.135	65,22
Meningkatnya kualitas kelembagaan DPMPTSP	Meningkatnya implementasi SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	74,58	74,61	100,04
	Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan perizinan	Indek kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	Indek	96,65	95,51	98,82

Sedangkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga untuk Pos Anggaran Belanja Langsung Pagu anggaran sebesar Rp. 4.474.874.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.295.956.656,00 atau 96,00 % dari pagu anggaran sehingga ada penghematan anggaran sebesar Rp.178.917.344,00 atau 4,00 %, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp 3.588.870.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.415.842.130,00 (95,18 %) dengan efisiensi sebesar Rp 173.027.870,00 (4,82 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 976.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 950.000,00 (97,34 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 26.000,00 (2,66 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 400.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 397.500,00 (99,38 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 2.500,00 (0,63%). Keluarannya berupa tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah (renja, rka).

a.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 576.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 552.500,00 (95,92 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 23.500,00 (4,08%). Keluarannya berupa tersedianya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah. (LKJiP, LKPJ, PK, Lap. Aset, LRA)

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.751.812.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.589.409.648,00 (97,35 %) dengan efisiensi sebesar Rp.162.402.352,00 (5,90%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.668.433.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.508.475.379,00 (94,01 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 159.957.621,00 (5,99 %). Keluarannya berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN sejumlah 19 orang

b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pagu anggaran sebesar Rp. 61.339.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 61.331.719,00 (99,99 %) dengan efisiensi sebesar Rp.7.281,00 (0,01%). Keluarannya berupa terlaksananya administrasi tugas ASN

b.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 22.040.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 19.602.550,00 (88,94 %) dengan efisiensi sebesar Rp.2.437.450,00 (11,06%). Keluarannya berupa terlaksananya pembayaran honor pengelolaan keuangan, pemeriksa hasil pekerjaan, pejabat pengadaan dan operator komputer.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.788.750,00 (99,77 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 11.250,00 (0,23%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

c.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.800.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 4.788.750,00 (99,77 %). dengan efisiensi sebesar Rp.11.250,00 (0,23%). Keluarannya yaitu tersedianya administrasi barang milik daerah

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.947.000,00 (98,68 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 53.000,00 (1,33%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

d.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.947.000,00 (98,68 %). dengan efisiensi sebesar Rp.53.000,00 (1,33%). Keluarannya yaitu Terlaksananya diklat ASN berdasarkan tugas dan fungsi

e. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 57.871.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan Rp. 57.019.723,00 (98,53 %) dengan efisiensi sebesar Rp.851.277,00 (1,47 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

e.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik, Penerangan Bangunan Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 2.022.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.021.600,00 (99,98 %). dengan efisiensi sebesar Rp.400,00 (0,02%). Keluarannya yaitu tersedianya peralatan listrik, penerangan bangunan kantor

e.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu anggaran sebesar Rp. 39.197.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 38.387.523,00 (97,93 %). dengan efisiensi sebesar Rp.809.477,00 (2,07%). Keluarannya yaitu tersedianya bahan logistik kantor (bahan pembersih dan alat kebersihan, pengisian tabung gas, bibit tanaman dan BBM kendaraan dinas)

e.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Pagu anggaran sebesar Rp. 1.152.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.127.600,00 (97,88 %). efisiensi sebesar Rp.24.400,00 (2,12%). Keluarannya yaitu tersedianya bahan bacaan / koran , peraturan perundangan

e.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pagu anggaran sebesar Rp. 0,00. Realisasi fisik 0%, realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 (0 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 0,00 (0 %). Keluarannya yaitu tersedianya jamuan tamu .

e.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 11.900.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 11.900.000,00 (100 %). dengan efisiensi sebesar Rp.0,00 (0 %). Keluarannya yaitu tersedianya jamuan tamu dan rapat.

e.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.583.000,00 (99,53 %). dengan efisiensi sebesar Rp.17.000,00 (0,47%). Keluarannya yaitu tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Pagu anggaran sebesar Rp. 659.595.000,00. Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 650.136.198,00 (98,57 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 9.458.802,00 (1,43 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :
- f.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pagu anggaran sebesar Rp. 489.700.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 480.688.166,00 (98,16 %). dengan efisiensi sebesar Rp.9.011.834,00 (1,84%). Keluarannya berupa tersediainya pelayanan umum kantor.
- f.2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pagu anggaran sebesar Rp. 360.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 211.500,00 (58,75 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 148.500,00 (41,25%). Keluarannya berupa perangko dan jasa pos /pengiriman.
- f.3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pagu anggaran sebesar Rp. 165.935.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 165.736.532,00 (99,88 %). dengan efisiensi sebesar Rp.198.468,00 (0,12%). Keluarannya berupa tersediainya daya listrik, air PDAM, jasa telekomunikasi.
- f.4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.500.000,00 (97,22 %). dengan efisiensi sebesar Rp.100,00 (2,78%). Keluarannya berupa tersediainya peralatan dan perlengkapan kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pagu anggaran sebesar Rp. 109.816.000,00 Realisasi Fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 109.590.811,00 (99,79 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 225.189,00 (0,21 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :
- g.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Pagu anggaran sebesar Rp. 98.952.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 98.894.461,00 (99,94 %). dengan efisiensi sebesar Rp.57.539,00 (0,06%). Keluarannya berupa terpeliharanya kendaraan dinas roda 4

(empat) dan 2 (dua) sebanyak 17 unit (5 kendaraan dinas roda empat dan 12 kendaraan dinas roda 2 (dua)

g.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pagu anggaran sebesar Rp. 6.864.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 6.737.750,00 (98,16 %). dengan efisiensi sebesar Rp.126.250,00 (1,84%). Keluarannya berupa ter[eliharanya peralatan kerja.

g.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 3.958.600,00 (98,97 %). dengan efisiensi sebesar Rp.41,400,00 (1.04%). Keluarannya berupa ter[eliharanya peralatan kerja.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 30.480.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 29.850.000,00 (97,93 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 630.000,00 (2,07%). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 16.480.000,00 Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 16.470.000,00 (99,94%) dengan efisiensi sebesar Rp. 10.000,00 (0,06%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 12.480.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 12.480.000,00 (100 %). Keluarannya tersusunya dokumen regulasi penanaman modal

a.2. Fasilitas Kemitraan Yag Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00. Realisasi fisik (100 %), realisasi keuangan sebesar Rp. 3.990.000,00 (99,75 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp.10.000,00 (0,25%) Keluaranya Tersusunya laporan evaluasi Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 13.380.000,00 (95,57 %). dengan efisiensi sebesar Rp. 620.000,00

(4,43%). Keluarannya Tersusunya buku profil investasi dan buku induk penanaman modal.

b.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 6.670.000,00 (95,29 %). dengan efisiensi sebesar Rp.330.000,00 (4,71%) Keluaranya jumlah dokumen rencana umum penanaman modal

b.2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00. Realisasi fisik 100 %, realisasi keuangan sebesar Rp. 6.710.000,00 (95,86 %). dengan efisiensi sebesar Rp.290.000,00 (4,14%) Keluaranya sektor usaha terpetakan

3. Program Promosi Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 39.596.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 39.466.066.000,00 (99,67 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 129.934,00 (0,33%). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu anggaran sebesar Rp. 39.596.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 39.466.066,00 (99,67 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 129.934,00 (0,33%). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

Pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 6.880.000,00 (98,29 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.120.000,00 (1,71 %). Keluarannya berupa Kebijakan promosi penanaman modal.

a.2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran sebesar Rp. 32.596.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 32.586.066,00 (99,97 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.9.934,00 (0,03 %). Keluarannya berupa Jumlah kegiatan promosi penanaman modal.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 179.986.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 178.217.540,00 (99,02 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 1.768.460,00 (0,98 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 179.986.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 178.217.540,00 (99,02 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.768.460,00 (0,98 %) Kegiatan ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

a.1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Pagu Anggaran sebesar Rp.169.114.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 167.529.440,00 (99,06 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.584.560,00 (0,94 %) Keluarannya terlaksananya sosialisasi perizinan

a.2. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.872.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.688.100,00 (98,31 %) efisiensi anggaran sebesar Rp. 183.900,00 (1,69 %), Keluarannya jumlah obyek perijinan yang dipantau, analisa, evaluasi dan pelaporan.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 623.022.000. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 620.126.720,00 (99,54 %) dengan efisiensi sebesar Rp. 2.895.280,00 (0,46 %). Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 623.022.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 620.126.720,00 (99,54 %) efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.895.280,00. (0,46 %) Program ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut:

a.1. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Di Hadapai Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 38.312.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 37.978.370,00 (99,13 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.333.630,00. (0,87 %) Keluarannya jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha.

a.2. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 441.342.000,00. Realisasi fisik 100%, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp. 438.780.700,00 (99,42 %), efisiensi anggaran sebesar Rp.2.561.300,00. (0,58 %) Keluarannya jumlah Perusahaan yang dibina.

a.3. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Pagu Anggaran sebesar Rp. 143.368.000,00. Realisasi fisik 100 %, sedangkan realisasi keuangannya sebesar Rp.143.367.650,00 (100 %), efisiensi anggaran sebesar Rp. 350,00. (0,00 %) Keluarannya jumlah laporan pengawasan penanaman modal.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pagu anggaran sebesar Rp. 12.920.000,00. Realisasi fisik 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 12.454.200,00 (96,39 %) dengan efisiensi sebesar Rp.465.800,00 (3,61%).

Program ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah.

Pagu anggaran sebesar Rp. 12.920.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 12.454.200,00 (96,39 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp. 465.800,00 (3,61 %). Kegiatan ini dijabarkan dalam sub-sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pagu anggaran sebesar Rp. 12.920.000,00. Realisasi fisik 100%. realisasi keuangan sebesar Rp. 12.454.200,00 (96.39 %). Efisiensi anggaran sebesar Rp.465.800,00 (3,61 %). Keluarannya berupa jumlah dokumen yang diintegrasikan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga telah melakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan promosi dilaksanakan dengan 2 (dua) even / kegiatan yaitu melalui pameran di Kabupaten Sukoharjo dan CJiBF di Kabupaten Batang. Pelaksanaan kegiatan promosi ini adalah salah satu upaya memperkenalkan potensi investasi yang ada di Kabupaten Purbalingga, termasuk sektor investasi yang potensial untuk dikembangkan. Dengan adanya kegiatan promosi ini juga membuka pasar potensial bagi produk-produk Kabupaten Purbalingga untuk dipasarkan lebih luas ke luar Purbalingga.

2. Sebagai upaya peningkatan jumlah investor yang menanamkan modal di Kabupaten Purbalingga, maka DPMPTSP Kabupaten Purbalingga juga melakukan upaya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Purbalingga secara bertahap. Jumlah investor yang telah menanamkan investasinya di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 sebanyak 14.224 investor dengan nilai realisasi investasinya sebesar Rp.1.001.180.131.135,-
3. Sebagai tindak lanjut diterbitkannya perizinan dan non perizinan maka dilakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk memastikan kepatuhan pemegang perizinan terhadap ketentuan perizinan dan nonperizinan. Sepanjang tahun 2024 perizinan yang dilakukan pemantauan dan pengawasan sebanyak 112 izin perusahaan. Secara bertahap obyek pengawasan akan ditingkatkan guna meningkatkan tertib administrasi perizinan khususnya dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) serta meningkatkan realisasi investasi.
4. Melaksanakan survei berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditujukan kepada pelaku usaha atau pengguna layanan, dimana hasil dari penilaian akan menjadi tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan perizinan oleh aparatur pemerintah, khususnya aparatur pelayanan perizinan dan nonperizinan. Hasil pelaksanaan survei adalah 95,51 yang diklasifikasikan sebagai mutu pelayanan Sangat Baik atau bernilai A.

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2024
KABUPATEN PURBALINGGA**

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)x100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)x100%
2										
2	18									
2	18	01								
2	18	01	2	01						
2	18	01	2	01	01					
2	18	01	2	01	07					
2	18	01	2	02						
2	18	01	2	02	01					

2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Kunjungan Lapangan / survey Koordinasi/ Undangan/ SPPD Dalam Daerah dan Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2	18	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya LRA / LK / SPM	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Prosentase Pengelolaan Administrasi Asset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
2	18	01	2	03	01	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100 %	12 paket	12 paket	100 %
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100 %	12 paket	12 paket	100 %
2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2	18	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
2	18	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	12 dokumen	100 %
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %

2	18	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangko, Materai dan Jasa Pos / Pengiriman	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Daya Listrik, Air PAM dan Jasa Telekomunikasi	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	12 laporan	100 %
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	17 unit	17 unit	17 unit	17 unit	100 %	17 unit	17 unit	100 %
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100 %	12 unit	12 unit	100 %
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Score Iklim Usaha	82,00	80,00	80,00	80,00	100 %	82,00	82,00	100 %
2	18	02	2	01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen regulasi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %

2	18	02	2	01	02	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	92%	80 %	89%	89%	100 %	92%	92%	100 %
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	1 sektor	1 sektor	1 sektor	1 sektor	100 %	1 sektor	1 sektor	100 %
2	18	02	2	02	01	Peyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
2	18	02	2	02	02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	5 sub sektor	5 sub sektor	5 sub sektor	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Kepeminatan Investasi	3 investor	3 investor	3 investor	3 investor	100 %	3 investor	3 investor	100 %
2	18	03	2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi	10 investor	10 investor	10 investor	10 investor	100 %	10 investor	10 investor	100 %
2	18	03	2	01	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	3 dokumen	3 dokumen	100 %
2	18	03	2	01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
2	18	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pelayanan Publik Bidang Investasi	4,20 point	4,00 point	4,10 point	4,10 point	100 %	4,20 point	4,20 point	100 %
2	18	04	2	01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani di DPMPSTP	114 jenis	114 jenis	114 jenis	114 jenis	100 %	114 jenis	114 jenis	100 %
2	18	04	2	01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Jenis Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	114 jenis	114 jenis	114 jenis	114 jenis	100 %	114 jenis	114 jenis	100 %

2	18	04	2	01	02	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pellaopran di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pellaopran di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	92 %	80 %	89%	89%	100 %	92 %	92 %	100 %
2	18	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %
2	18	05	2	01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	216 pelaku usaha	216 pelaku usaha	216 pelaku usaha	216 pelaku usaha	100 %	216 pelaku usaha	216 pelaku usaha	100 %
2	18	05	2	01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	20 kegiatan	100 %	20 kegiatan	20 kegiatan	100 %
2	18	05	2	01	02	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan tehnik/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	800 pelaku usaha	800 pelaku usaha	800 pelaku usaha	800 pelaku usaha	100 %	800 pelaku usaha	800 pelaku usaha	100 %
2	18	05	2	01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	112 pelaku usaha	112 pelaku usaha	112 pelaku usaha	112 pelaku usaha	100 %	112 pelaku usaha	112 pelaku usaha	100 %
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Up to date	75 %	34,68%	64,52%	64,52%	100 %	75 %	75 %	100 %
2	18	06	2	01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Data Yang Terintegrasi	75 %	34,68%	64,52%	64,52%	100 %	75 %	75 %	100 %

2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data Yang Terintegrasi	86 dokumen	35 berkas	74 dokumen	74 dokumen	100 %	86 dokumen	86 dokumen	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu perizinan terpadu. Dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan tugas ini karena adanya komitmen kerja yang baik di bidang tugas masing-masing yang ada di DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2024, dapat kami uraikan analisis kinerja DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga digunakan untuk mengukur/ memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2026. Adapun capaian indikator pada tahun 2024 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Penanaman Modal

Realisasi investasi baru dan pengembangan / perluasan sektor swasta baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.A1.

Tabel Realisasi Investasi Baru/Pengembangan di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 - 2024

No	Tahun	Realisasi Investasi (Rp)
1.	2016	483.271.000.000
2.	2017	547.076.000.000
3.	2018	622.870.314.578
4.	2019	679.695.974.162
5.	2020	758.271.424.434
6.	2021	1.462.142.613.812
7.	2022	1.499.620.359.229
8.	2023	1.535.015.624.405
9.	2024	1.001.180.131.135

Tabel 2.2.A2.

Daftar Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2024.

No.	Nama Perusahaan
1	PT Royal Korindah
2	PT Boyang Industrial
3	PT Indokores Sahabat
4	PT Kesan Baru Sejahtera
5	PT Sung Chang Indonesia
6	PT Sung Shim International
7	PT Hasta Pustaka Sentosa
8	PT Yuro Mustika
9	PT Hanmi Hair International
10	PT Interwork Indonesia
11	PT Milan Indonesia
12	PT Won Jin Indonesia
13	PT Sophian Indonesia
14	PT Hyup Sung Indonesia
15	PT Victoria Beauty Industrial
16	PT Woosung Wig Indonesia
17	PT SSE Fashions Indonesia
18	PT Inter Costech Indonesia
19	PT John Toys Indonesia
20	PT Nina Venus Indonusa
21	PT Universal Fishing Gear Solutions
22	PT Buyoung Profesional Indonesia
23	PT Sumber Graha Sejahtera
24	PT Inkobuma Beauty Indonesia
25	PT Cosmoprof Indokarya

B. Bidang Pelayanan Perizinan

Kinerja layanan perizinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.B1

Tabel kinerja layanan perizinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

No	Jenis Izin	Jumlah Ijin Yang Diterbitkan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Izin Lokasi / Pemanfaatan Lahan	10	11	9	380	2.517	-
2.	Izin Gangguan (HO)	772	619	-	-	-	-
3.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	641	922	652	655	780	322
4.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	1.004	1.036	699	442	698	444
5.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB	1.016	1.046	706	717	2.517	2.302
6.	IUI/TDI	30	42	59	38	72	45
7.	Izin Reklame	913	512	388	463	285	1.026
8.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	146	87	90	67	466	196
9.	Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP)	22	7	2	1	6	-
10.	Izin Pertambangan Daerah (Gol. C)	15	11	10	16	-	-
11.	Izin Pemakaian Tanah Pengairan	51	36	14	10	7	10
12.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	-	1	-	-	14	8
13.	Izin Bidang Kesehatan	-	320	1.334	797	838	1.333
	JUMLAH	4.620	4.650	3.963	3.586	8.200	5.686

Tabel kinerja layanan perizinan tahun 2022 s.d. 2024

No	Jenis Perizinan	Nama Perizinan	Jml Izin yg diterbitkan Tahun 2022	Jml Izin yg diterbitkan Tahun 2023	Jml Izin yg diterbitkan Tahun 2024
1	Perizinan Berusaha				
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)		7141	13517	9969
	b. Sertifikat Standar				
	1. Sektor Perikanan		37	360	110
	2. Sektor Pertanian		80	87	55
	3. Sektor Perdagangan		26	0	28
	4. Sektor Industri		283	505	265
	5. Sektor Komunikasi dan Informatika		4	0	0
	6. Sektor Angkutan		10	0	0
7. Sektor Perhubungan		0	0	0	

	8. Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan	66	77	45
	9. Sektor Pariwisata	47	61	37
	10.Sektor Koperasi	0	0	0
c. Izin				
	1. Sektor Perikanan	0	0	0
	2. Sektor Pertanian	0	0	0
	3. Sektor Perdagangan	0	0	0
	4. Sektor Industri	1	0	0
	5. Sektor Komunikasi dan Informatika	0	0	0
	6. Sektor Angkutan	0	0	0
	7. Sektor Perhubungan	0	0	0
	8. Sektor Obat, Makanan dan Kesehatan	26	12	11
	9. Sektor Pariwisata	0	0	0
	10.Sektor Koperasi	2	0	0
2	Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (UMKU)			
	a. Sektor Perikanan			
	Surat Izin Usaha Perikanan	0	0	0
	b. Sektor Pertanian			
	1) Pelayanan Jasa Laboratorium	0	0	0
	2) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)	0	0	0
	3) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)	0	0	0
	4) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)	0	0	0
	5) Sertifikat Cara Budi Daya Ternak yang Baik	0	0	0
	6) Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	0	0	0
	7) Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT- PDUK).	21	13	0
	c. Sektor Perdagangan			
	1) Tanda Daftar Gudang	11	6	0
	2) Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C);	0	0	0
	3) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	0	0	0
	4) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	0	0	0
	d. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
	1) Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan	0	3	1
	2) Izin pengusahaan sumber daya air (Wilayah sungai menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota);	0	0	0

	e. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan				
		1) Label pengawasan/ pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten	0	0	0
		2) Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);	0	0	0
		3) Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	2	2	0
		4) Sertifikat laik sehat - di wilayah	0	0	0
		5) Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).	453	468	133
3	Persyaratan Dasar				
	1. KKPR	PKKPR	1	55	10
		KKKPR	0	4	2
	2. PBG		118	119	194
4	Perizinan Berusaha Lainnya / Perizinan Non Berusaha				
	1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non -Berusaha	5	62	51
	2	Surat Keterangan Penelitian (SKP)	2	3	2
	3	Izin Penggunaan Aset Daerah untuk Fasilitas Olahraga	0	0	0
	4	Surat Kelayakan Operasional (SLO) kegiatan non berusaha dan atau kegiatan pemerintah	0	0	0
	5	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan inseminator (SIPP Inseminator)	0	0	0
	6	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan (SIPP PKb)	0	0	0
	7	Surat Izin Paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi (SIPP ATR)	0	0	0
	8	Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan	0	0	0
	9	Izin Usaha Pematangan Hewan dan / atau Penanganan Daging	0	0	0
	10	Izin Usaha Pelayanan Klinik Praktek Bersama	0	0	0
	11	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal	0	2	2
	12	Izin Perubahan Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan	0	0	0
	13	Izin Penutupan Program atau Satuan Pendidikan	0	0	0
	14	Surat keterangan rencana pembangunan perumahan bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0	0	0
	15	Persetujuan dan pengesahan dokumen Rencana Teknis Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0	0	0
	16	Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	0	14	3
	17	Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Daerah	0	0	0
	18	Izin Pemanfaatan Rumah Susun	0	0	0
	19	Izin Penebangan Turus Jalan	0	0	0
	20	Izin Pelandaian Trotoar	0	0	0
	21	Persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal, Bangunan Milik Permerintah dan Bangunan untuk Kegiatan Non Berusaha Lainnya	0	37	0

	22	Izin Menggunakan Tanah Pengairan	0	8	4
	23	Izin Operasional Klinik Pemerintah Non-BLU	2	0	0
	24	Izin Laboratorium Milik Pemerintah	-	-	2
	25	Izin Reklame	-	-	1331
5	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan				
	1	Surat Izin Praktik Dokter/ Dokter Gigi	67	255	252
	2	Surat Izin Praktik Apoteker	70	80	64
	3	Surat Izin Praktik Perawat	661	522	372
	4	Surat Izin Praktik Bidan	516	210	108
	5	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	82	65	45
	6	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	58	28	47
	7	Surat Izin Praktik Fisioterapi	5	4	7
	8	Surat Izin Praktik Radiografer	18	9	13
	9	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	37	15	8
	10	Surat Izin Praktik Perekam Medik	53	31	16
	11	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	26	8	6
	12	Surat Izin Praktik Refraksionis atau Optisien	6	2	1
	13	Surat Izin Praktik Sanitarian	13	23	8
	14	Surat Izin Praktik Psikolo Klinis	2	0	8
	15	Surat Izin Praktik Elektromedik	5	2	1
	16	Surat Izin Praktik Penata Anestesi	10	3	1
	17	Surat Izin Praktik Okupasi Terapi	2	0	1
	18	Surat Izin Praktik Teknisi Tranfusi Darah	7	2	4
	19	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	2	7	1
	20	Surat Izin Praktik Terapi Wicara	-	1	1
	21	Surat Izin Praktik Bidan Mandiri	-	63	18
	22	Surat Izin Praktik Perawat Mandiri	-	8	12
	23	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik	-	1	0
Jumlah Total Izin Diterbitkan			9978	18530	13249

Tabel 2.3. Adapun capaian indikator pada tahun 2024 berdasarkan target renstra dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisa
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	URUSAN PENANAMAN MODAL															
	- Pertumbuhan Nilai Investasi			7,46	12,92	11,44	2,37	9,30	9,30	92,82	23,65	2,40	(34,79)	9,30	9,30	
	- Nilai Realisasi Investasi			720	813	906	1.535	1.093	1.200	1.462	1.499	1.535	1.001	1.093	1.200	
	- Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			71,32	71,35	71,37	74,61	75,00	75,20	72,76	75,76	74,56	74,61	74,61	75,20	
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perizinan			82,25	82,50	88,05	95,51	96,68	97,00	85,53	96,04	96,62	95,51	96,68	97,00	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
a	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
b	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
c	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
d	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
e	Persentase pengadaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
f	Persentase pemeliharaan barang milik daerah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal															
a	Score Iklim Usaha			78,3	78,3	80	80	82	82	78,80	92,90	91,35	93,70	82	82	
3	Program Promosi Penanaman Modal															
a	Jumlah Kepeminatan Investasi			2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	
4	Program Pelayanan Penanaman Modal															

a	Indek Pelayanan Publik Bidang Investasi			3,90	3,95	4,00	4,10	4,20	4,50	4,42	4,51	4,51	4,51	4,20	4,50	
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal															
a	Prosentase Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			85	95	100	100	100	100	91	97,03	98,06	98,35	100	100	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal															
a	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Update			9,68	23,39	34,68	64,52	75,00	84,68	12,00	23,39	99,12	100	75,00	84,68	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi DPMPTSP dimasa datang, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPTSP Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Peningkatan Realisasi investasi dengan mengupayakan peningkatan pemberdayaan UMKM;
2. Perlunya Peningkatan Mall Pelayanan Publik untuk melayani masyarakat secara satu atap;
3. Perlunya Data dan Informasi tentang potensi investasi.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Daerah mencakup:
 1. Terhambatnya investasi karena lahan diperuntukan industri dan infrastruktur pendukung kurang menarik bagi calon penanam modal;
 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanaman modal.
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Promosi Penanaman Modal
 1. Belum adanya dokumen strategi promosi Penanaman Modal;
 2. Arah kebijakan potensi dan peluang investasi masih berada di tiap OPD, belum menjadi kebijakan di tingkat Kabupaten;
 3. Belum optimalnya promosi dikarenakan keterbatasan anggaran dan cakupan media promosi.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis Pengendalian Penanaman Modal :
 1. Belum maksimalnya pencatatan realisasi investasi berbasis LKPM (laporan kegiatan penanaman modal) karena kesadaran dan keterbatasan SDM pelaku usaha;
 2. Belum optimalnya cakupan pengawasan pelaksanaan penanaman modal karena keterbatasan SDM, sarana prasarana dan anggaran.

- d. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pelayanan Penanaman Modal:
 - 1. Masih belum optimalnya koordinasi antara perangkat daerah dalam upaya peningkatan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
 - 2. Belum semua unit melaksanakan fungsi utama bidang penanaman modal yaitu promosi, pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal;
 - 3. Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.

- e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal:
 - 1. Belum adanya inovasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu;
 - 2. Kurangnya tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman dan pelayanan perijinan terpadu.

- f. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas :
 - 1. Kurang maksimalnya fungsi kearsipan dinas;
 - 2. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi dinas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Program prioritas pembangunan daerah memuat program - program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada tabel berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

						Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Kode						Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2																
2	18					PENANAMAN MODAL			4.217.761.000	PENANAMAN MODAL				4.466.017.000		
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Purbalingga	Persentase Temuan Lembaga Pengawas Yang Ditindaklanjuti	100%	3.839.397.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Purbalingga	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	4.092.825.000	
2	18	01	2	01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	976.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	% Ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	976.000	
2	18	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (renja, rka)	2 dokumen	400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	400.000	
2	18	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (lkip, lppd, lkjip, laporan rkpdp)	5 laporan	576.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (lkip, lppd, lkjip, laporan rkpdp)	5 laporan	576.000	
2	18	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase Temuan Pengelola Anggaran Yang Ditindaklanjuti	100%	2.876.729.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.121.160.000	
2	18	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 ASN	2.793.350.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 ASN	3.037.141.000	

2	18	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	61.339.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	51.339.000	
2	18	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	22.040.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	32.680.000	
2	18	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	4.800.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	4.800.000	
2	18	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	12 Laporan	4.800.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Purbalingga	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	2 Laporan	4.800.000	
2	18	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	100%	4.000.000	
2	18	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tupoksi	Purbalingga	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tupoksi	Purbalingga	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	4.000.000	
2	18	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase ketersediaan Administrasi Umum	100%	81.347.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase ketersediaan Administrasi Umum	100%	69.332.000	
2	18	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Purbalingga	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	2.022.000	
2	18	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	47.895.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	47.958.000	

2	18	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 dokumen	1.152.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Purbalingga	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12 dokumen	1.152.000		
2	18	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	7.500.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Purbalingga	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	5.000.000		
2	18	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 laporan	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Purbalingga	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 laporan	9.600.000		
2	18	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	4.800.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Purbalingga	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 dokumen	3.600.000		
2	18	01	2	07		Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan			-	Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	% Ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	46.192.000	
2	18	01	2	07	08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah barang milik daerah pada skpd			-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah unit peralatan dan mein lainnya	6 unit	46.192.000	
2	18	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	697.095.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Purbalingga	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	681.795.000		
2	18	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	360.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	360.000		
2	18	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	197.435.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	201.435.000		

2	18	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	3.600.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	13.600.000	
2	18	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	495.700.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	466.400.000	
2	18	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	% Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	168.450.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	% Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	164.570.000	
2	18	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	130.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit	128.952.000	
2	18	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	12 unit	7.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	12 unit	10.618.000	
2	18	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 unit	30.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 unit	25.000.000	
2	18	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Score Iklim Usaha	82 point	38.960.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Persentase LOI yang ditindaklanjuti	100%	80.480.000	
2	18	02	2	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	1 dokumen	24.960.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	2 dokumen	11.000.000	

2	18	02	2	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah dokumen regulasi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	12.480.000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah dokumen regulasi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	7.000.000	
2	18	02	2	01	02	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	92%	12.480.000	Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	dokumen	4.000.000	
2	18	02	2	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Purbalingga	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	1 sektor	14.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Purbalingga	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	2 sektor usaha	69.480.000	
2	18	02	2	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	1 dokumen	7.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	1 dokumen	57.000.000	
2	18	02	2	02	02	Penyusunan Peta Potensi Investasi di Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	7.000.000	Penyusunan Peta Potensi Investasi di Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	1 dokumen	12.480.000	
2	18	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Jumlah Kepeminatan Investasi	3 investor	39.596.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Persentase Kepeminatan Investasi	100%	76.236.000	
2	18	03	2	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi	10 investor	39.596.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi	10 investor	76.236.000	
2	18	03	2	01	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 dokumen	7.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	3 dokumen	69.236.000	
2	18	03	2	01	02	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	32.596.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Purbalingga	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	7.000.000	

2	18	04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Indek Pelayanan Publik Bidang Investasi	4,20 point	140.596.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	99%	83.264.000
2	18	04	2	01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Purbalingga	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani di DPMPSTP	124 jenis	140.596.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Purbalingga	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani di DPMPSTP	114 jenis	83.264.000
2	18	04	2	01	01		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	Jumlah jenis perizinan yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	124 jenis	129.724.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	12000 pelaku usaha	72.392.000
2	18	04	2	01	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaopran di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Purbalingga	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaopran di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	92 kegiatan	10.872.000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaopran di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Purbalingga	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaopran di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	13 kegiatan usaha	10.872.000
2	18	05					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Prosentase Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %	146.292.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Persentase Penyelesaian Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 %	120.292.000
2	18	05	2	01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Purbalingga	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	216 pelaku usaha	146.292.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Purbalingga	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	200 pelaku usaha	120.292.000

2	18	05	2	01	01	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Purbalingga	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	20 kegiatan	36.292.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Purbalingga	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 kegiatan usaha	30.292.000
2	18	05	2	01	02	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Purbalingga	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	800 pelaku usaha	80.000.000	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Purbalingga	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	200 pelaku usaha	60.000.000
2	18	05	2	01	03	Pengawasan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	112 kegiatan usaha	30.000.000	Pengawasan Penanaman Modal	Purbalingga	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	44 kegiatan usaha	30.000.000
2	18	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Tersaji Secara Up to date	75%	12.920.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Purbalingga	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	100%	12.920.000
2	18	06	2	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Purbalingga	Persentase Data Yang Terintegrasi	75%	12.920.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Purbalingga	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	18000 dokumen	12.920.000

2	18	06	2	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	93 data	12.920.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Purbalingga	jumlah data yang terintegrasi	12000 dokumen	12.920.000

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang ada di Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Purbalingga tahun 2026 merupakan program / kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), hal tersebut dikarenakan tidak adanya usulan program / kegiatan dari masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus ikut mendukung dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”**.

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 pada misi ke 1 yaitu *Bangkitkan Ekonomi Rakyat : Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian*. Salah satu tujuan dari misi ke 1 yang erat kaitannya dengan penanaman modal adalah *Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat*, dengan sasaran *Meningkatnya Investasi dan Kegiatan Ekonomi Masyarakat*.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan Pembangunan Penanaman Modal

Pada RPJMD (2025-2029), Pembangunan urusan penanaman modal merupakan bagian dari Misi ke 1 yaitu Bangkitkan ekonomi rakyat, untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat yang implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing small scale enterprise melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa,

pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga dapat menumbuhkan wirausaha baru dan UMKM dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

Seiring dengan tujuan pembangunan urusan investasi atau penanaman modal, maka *tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah **Meningkatnya Realisasi Investasi.***

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah : ***"Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah"***

Target Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sasaran Pada tahun 2026
1	Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Angka	97,00
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,20

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Tabel 3.1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun (Rp. Juta)						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Realisasi Investasi		Persentase Capaian Realisasi Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA+PMDN) Tahun N / Target Nilai Realisasi Investasi (PMA+PMDN) Tahun N x 100
		Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	IKM Pelayanan Terpadu Satu Pintu	angka	96,68	97,00	97,50	98,00	98,50	99,00	Hasil Perhitungan SKM di aplikasi Alpukat
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	nilai	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

BAB IV

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

(Memuat Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif)

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dapat dilihat melalui usulan rincian anggarannya sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Usulan Anggaran	+/-
		2025	2026	
.	Belanja	4.217.761.000,-	4.466.017.000,-	-
	- Langsung	4.217.761.000,-	4.466.017.000,-	-

Secara keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan pada Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG
TAHUN 2025**

No.	Nama Program	Banyak Kegiatan		Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8	keg	3.711.209.000
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2	keg	130.480.000
3.	Program Promosi Penanaman Modal	1	keg	139.596.000
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1	keg	83.264.000
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1	keg	140.292.000
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1	keg	12.920.000
Jumlah		14	keg	4.217.761.000

Adapun Program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2026

Kode	Urusan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2											
2	18						4.466.017.000				4.526.759.000
2	18	01			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	Purbalingga	-		Terlaksananya temuan lembaga pengawas yang ditindaklanjuti		-
					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai ketentuan		100 %	976.000	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	100 %	976.000

									Persentase laporan administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	3.121.160.000		Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3.325.801.000
									Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan		100 %	215.562.000		Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya penunjang perangkat daerah	100 %	215.422.000
									Persentase Pemenuhan Layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang		100 %	755.127.000			100 %	755.267.000
2	18	01	2	01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	100%	976.000			Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	976.000
2	18	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (renja, rka)	Purbalingga	2 dokumen	400.000	APBD		Tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	400.000
2	18	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (lkip, lppd, lkjip, laporan rkpd)	Purbalingga	5 laporan	576.000	APBD		Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	5 laporan	576.000

2	18	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelola Anggaran Yang Ditindaklanjuti	Purbalingga	100%	3.121.160.000		Terselesainya temuan pengelola anggaran yang ditindaklanjuti	100%	3.181.902.000
2	18	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Purbalingga	20 ASN	3.037.141.000	APBD	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	20 ASN	3.097.883.000
2	18	01	2	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Purbalingga	12 dokumen	51.339.000	APBD	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	51.339.000
2	18	01	2	02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Purbalingga	12 dokumen	32.680.000	APBD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	32.680.000
2	18	01	2	03			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	Purbalingga	100%	4.800.000		Tersusunya administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	100%	4.800.000
2	18	01	2	03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Purbalingga	12 Laporan	4.800.000	APBD	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada skpd	12 Laporan	4.800.000
2	18	01	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	Purbalingga	100%	4.000.000		Terlaksananya layanan kepegawaian perangkat daerah	100%	4.000.000

2	18	01	2	05	09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tupoksi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Purbalingga	4 orang	4.000.000	APBD	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	4 orang	4.000.000
2	18	01	2	06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Administrasi Umum	Purbalingga	100%	69.332.000		Tersusunya administrasi umum perangkat daerah	100%	69.332.000
2	18	01	2	06	01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Purbalingga	12 paket	2.022.000	APBD	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 paket	2.022.000
2	18	01	2	06	04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Purbalingga	12 paket	47.958.000	APBD	Tersedianya bahan logistik kantor	12 paket	47.958.000
2	18	01	2	06	06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Purbalingga	12 dokumen	1.152.000	APBD	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 dokumen	1.152.000
2	18	01	2	06	08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Purbalingga	12 laporan	5.000.000	APBD	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	5.000.000
2	18	01	2	06	09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Purbalingga	12 laporan	9.600.000	APBD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	12 laporan	9.600.000

2	18	01	2	06	11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Purbalingga	12 dokumen	3.600.000	APBD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	12 dokumen	3.600.000
2	18	01	2	07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan administrasi asset milik daerah sesuai ketentuan	Purbalingga	100%	46.192.000		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	46.192.000
2	18	01	2	07	08			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah pada skpd	Purbalingga	6 unit	46.192.000	APBD	Tersedianya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	6 unit	46.192.000
2	18	01	2	08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Purbalingga	100%	681.795.000		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	681.795.000
2	18	01	2	08	01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Purbalingga	12 laporan	360.000	APBD	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	360.000
2	18	01	2	08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Purbalingga	12 laporan	201.435.000	APBD	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	201.435.000

2	18	01	2	08	03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Purbalingga	12 laporan	13.600.000	APBD	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 laporan	13.600.000
2	18	01	2	08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Purbalingga	12 laporan	466.400.000	APBD	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	466.400.000
2	18	01	2	09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Purbalingga	100%	164.570.000		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100%	164.570.000
2	18	01	2	09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (ganti oli, ganti suku cadang dll) dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purbalingga	17 unit	128.952.000	APBD	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	17 unit	128.952.000
2	18	01	2	09	06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	Purbalingga	12 unit	10.618.000	APBD	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 unit	10.618.000
2	18	01	2	09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara /Direhabilitasi	Purbalingga	2 unit	25.000.000	APBD	Terlaksananya pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	25.000.000

2	18	02					PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase LOI yang ditindaklanjuti	Purbalingga	100%	80.480.000		Tercapainya score iklim usaha	100%	80.480.000
2	18	02	2	01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pemberian Insentif	Purbalingga	2 dokumen		11.000.000		Tersedianya kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 dokumen	11.000.000
2	18	02	2	01	01		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen regulasi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Purbalingga	1 dokumen		7.000.000	APBD	Ditetapkannya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	7.000.000
2	18	02	2	01	02		Fasilitasi Kemitraan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Purbalingga	1 dokumen		4.000.000	APBD	Terlaksananya kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	4.000.000
2	18	02	2	02			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Cakupan Sektor Usaha Terpetakan Menurut Potensi	Purbalingga	2 sektor usaha		69.480.000		Tersusunnya cakupan sektor usaha terpetakan menurut potensi	2 sektor usaha	69.480.000
2	18	02	2	02	01		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Jumlah rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	Purbalingga	1 dokumen		57.000.000	APBD	Tersusunnya dokumen rencana umum penanaman modal daerah kabupaten/kota	1 dokumen	57.000.000

2	18	02	2	02	02			Penyusunan Peta Potensi Investasi di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten/kota	Purbalingga	1 dokumen	12.480.000	APBD	Tersusunya peta potensi investasi kabupaten purbalingga/kota	1 dokumen	12.480.000
2	18	03					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase kepeminatan investasi	Purbalingga	100%	76.236.000		Terlaksananya jumlah kepeminatan investasi	100%	76.236.000
2	18	03	2	01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor Yang Melakukan Orientasi Investasi		Purbalingga	10 investor	76.236.000		Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	10 investor	76.236.000
2	18	03	2	01	01		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota		Purbalingga	3 dokumen	69.236.000	APBD	Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	3 dokumen	69.236.000
2	18	03	2	01	02		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal kabupaten/kota		Purbalingga	1 dokumen	7.000.000	APBD	Tersusunya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen	7.000.000
2	18	04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase pemenuhan persyaratan perizinan usaha sesuai ketentuan	Purbalingga	99%	83.264.000		Tercapainya Indeks Pelayanan Publik Bidang Investasi	99%	83.264.000

2	18	04	2	01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani di DPMPSTP	Purbalingga	114 jenis	83.264.000		Tersedianya pelayanan jenis perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	114 jenis	83.264.000
2	18	04	2	01	01		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Purbalingga	12000 pelaku usaha	72.392.000	APBD	Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	12000 pelaku usaha	72.392.000
2	18	04	2	01	02		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	Purbalingga	13 kegiatan usaha	10.872.000	APBD	Tertindakannya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha	13 kegiatan usaha	10.872.000
2	18	05					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kepatuhan pelaku usaha	Purbalingga	100 %	120.292.000		Tertindakannya Jumlah Kepatuhan Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100 %	120.292.000

2	18	05	2	01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Purbalingga	200 pelaku usaha	120.292.000		Terlaksananya pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	200 pelaku usaha	120.292.000
2	18	05	2	01	01		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Purbalingga	8 kegiatan usaha	30.292.000	APBD	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	8 kegiatan usaha	30.292.000
2	18	05	2	01	02		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	Purbalingga	200 pelaku usaha	60.000.000	APBD	Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	200 pelaku usaha	60.000.000
2	18	05	2	01	03		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Purbalingga	44 kegiatan usaha	30.000.000	APBD	Terlaksananya analisis dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku inspeksi lapangan terhadap kegiatan usaha serta evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha	44 kegiatan usaha	30.000.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi		Persentase capaian realisasi investasi	persen	100
		Meningkatnya Iklim Investasi Yang Kompetitif	Indek kepuasan masyarakat pelayanan terpadu satu pintu	angka	97,00
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perangkat daerah	Nilai	75,20

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Rancangan Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tahun 2026 dipastikan mempedomani Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 - 2029, telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

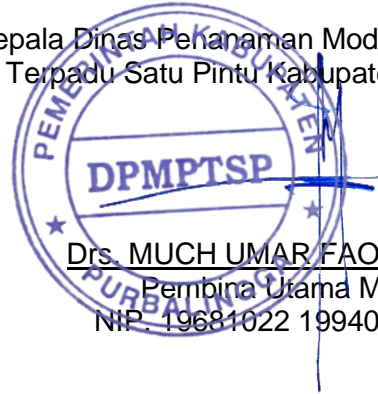
Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

Demikian penyusunan rancangan akhir rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Pembangunan dibidang Penanaman Modal secara umum untuk meningkatkan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya investasi daerah dan meningkatnya kualitas kelembagaan

atas pelayanan perizinan dengan tingkat keberhasilan yang optimal sehingga sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 9 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga



Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 199402 1 001